

## Pengaruh Karakteristik Komite Audit Independen terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024

Vanessa Radia Azarine <sup>a,1,\*</sup>, Aisyaturrahmi <sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup> Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231



<sup>1</sup> [vanessa.22092@mhs.unesa.ac.id](mailto:vanessa.22092@mhs.unesa.ac.id); <sup>2</sup> [aisyaturrahmi@unesa.ac.id](mailto:aisyaturrahmi@unesa.ac.id)

\*korespondensi author

### INFO ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Riwayat artikel

Dikirim: 24-3-2026

Direvisi: 31-3-2026

Diterima: 2-4-2026

#### Kata Kunci

Karakteristik Komite Audit Independen Tax Avoidance

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Karakteristik komite audit yang diuji meliputi ukuran komite audit, keberagaman gender, keahlian, dan independensi komite audit. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan menghasilkan 20 perusahaan dengan total 63 observasi. Tax avoidance diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, di mana nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat tax avoidance yang lebih tinggi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dan model terbaik yang dipilih adalah *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan keberagaman gender komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, keahlian komite audit dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan komite audit lebih ditentukan oleh kualitas anggotanya, khususnya kompetensi akuntansi-keuangan dan independensi, daripada jumlah anggota atau komposisi gender semata.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY.



## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional. Pada tahun 2024, penerimaan pajak menyumbang sekitar 82,4% dari total pendapatan negara, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi keberlanjutan pembiayaan publik (BPS, 2024). Namun demikian, sistem perpajakan Indonesia yang mengandalkan *self assessment system* masih menghadapi persoalan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yaitu upaya menekan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku (Purnomo, 2024). Meskipun secara formal *tax avoidance* berada dalam wilayah legal, praktik ini tetap menimbulkan persoalan karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara signifikan. Laporan *The State of Tax Justice 2020* bahkan menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp68,7 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak (Kompas, 2020).

Permasalahan tersebut juga tercermin dari *tax ratio* Indonesia yang masih relatif rendah. Rasio pajak merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas negara dalam menghimpun penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, *tax ratio* Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 9–10%, sedangkan menurut IMF, negara berkembang idealnya memiliki rasio pajak minimal sekitar 15% agar mampu mendukung pembiayaan publik secara efektif (Wildan, 2024). Rendahnya *tax ratio* ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara optimal, dan salah satu penyebab utamanya adalah praktik penghindaran pajak oleh pelaku usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar (Nisasilmi *et al.*, 2024; Daneshwara & Riandoko, 2023).

Fenomena tersebut tampak nyata pada sektor pertambangan, yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB), terutama pada periode pascapandemi ketika harga komoditas global meningkat. Akan tetapi, peningkatan kontribusi ekonomi sektor pertambangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan beban pajak perusahaan. Kontribusi PDB sektor pertambangan meningkat menjadi 8,98% pada tahun 2021 dan 12,22% pada tahun 2022, tetapi pada saat yang sama nilai *effective tax rate* (ETR) justru menurun dari 0,28 menjadi 0,22. Ketidaksejajaran antara kenaikan kontribusi ekonomi dan penurunan ETR tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Salah satu contoh yang sering disorot ialah PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang diduga memindahkan sebagian keuntungan ke entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah melalui skema transfer pricing, sehingga kewajiban pajak di Indonesia dapat ditekan (Global Witness, 2019).

Dari sudut pandang perusahaan, praktik *tax avoidance* sering dipandang sebagai strategi untuk mempertahankan laba setelah pajak. Beban pajak yang tinggi dianggap dapat menurunkan keuntungan perusahaan, sehingga manajemen terdorong untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif guna meminimalkan beban tersebut (Dang & Nguyen, 2022; Purnomo & Eriandani, 2022). Dalam pengertian akademik, *tax avoidance* merupakan strategi pengurangan pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam regulasi perpajakan (Dewi *et al.*, 2025). Meskipun demikian, praktik ini tidak sepenuhnya bebas dari risiko. *Tax avoidance* yang dilakukan secara agresif dapat menimbulkan risiko reputasi, meningkatkan kemungkinan pemeriksaan pajak, dan menimbulkan

ketidakpastian jangka panjang bagi perusahaan karena dipandang bertentangan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (Purnomo & Eriandani, 2022).

Untuk menekan peluang terjadinya *tax avoidance*, perusahaan memerlukan penerapan *good corporate governance* yang efektif. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal sehingga tindakan oportunistik manajemen dapat diminimalkan (Chandra & Cintya, 2021). Salah satu mekanisme pengawasan yang penting dalam struktur tata kelola tersebut adalah komite audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk menelaah proses pelaporan keuangan dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan (Purnomo & Eriandani, 2022). Dengan fungsi tersebut, komite audit memiliki posisi yang strategis untuk mengawasi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pelaporan pajak.

Urgensi peran komite audit juga dapat dijelaskan melalui *agency theory*. Dalam hubungan keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dan dapat bertindak oportunistik untuk mengejar kepentingannya sendiri, termasuk melalui praktik *tax avoidance* agar kinerja laba terlihat lebih baik (Ziliwu *et al.*, 2021; Hartinah, 2024). Dalam konteks ini, komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang membantu mengurangi konflik keagenan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, dari perspektif *stakeholder theory*, pengawasan terhadap *tax avoidance* juga penting karena pajak tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemegang saham, tetapi juga menyangkut pemerintah dan masyarakat yang bergantung pada penerimaan negara untuk pembiayaan layanan publik (Ernawati & Suryarini, 2024).

Efektivitas komite audit dalam menekan *tax avoidance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh karakteristik yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, karakteristik tersebut meliputi ukuran komite audit, keberagaman gender, keahlian anggota, dan independensi komite audit. Ukuran komite audit berkaitan dengan jumlah anggota yang terlibat dalam fungsi pengawasan; keberagaman gender mencerminkan keterlibatan perempuan dalam komite audit, keahlian menunjukkan adanya latar belakang akuntansi dan keuangan pada anggota komite audit, sedangkan independensi berkaitan dengan kemampuan anggota untuk bertindak objektif tanpa pengaruh manajemen (Dang & Nguyen, 2022; Qawqzeh & Al Zobi, 2025). Keempat karakteristik ini dipandang dapat memengaruhi kualitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Meski demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan karakteristik komite audit dan *tax avoidance* masih menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ukuran komite audit mampu menekan *tax avoidance*, sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil sebaliknya atau tidak signifikan (Ziliwu *et al.*, 2021; Purnomo & Eriandani, 2022; Hartinah, 2024). Temuan mengenai keberagaman gender juga belum konsisten, ada penelitian yang menilai perempuan cenderung lebih hati-hati dan etis dalam pengawasan, tetapi ada pula yang menemukan bahwa keberagaman gender tidak memberikan pengaruh berarti terhadap *tax avoidance* (Dang & Nguyen, 2022; Sulistyawati *et al.*, 2024; Qawqzeh & Al Zobi, 2025). Demikian pula, keahlian dan independensi komite audit dalam beberapa studi terbukti mampu menurunkan *tax avoidance*, tetapi pada studi lain menunjukkan pengaruh yang berbeda (Abdeljawad *et al.*, 2023; Aganthasyah, 2025; Qawqzeh

& Al Zobi, 2025). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik komite audit dan *tax avoidance* masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, khususnya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada kondisi ketika sektor pertambangan mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan pascapandemi akibat kenaikan harga komoditas global, namun ETR perusahaan tambang justru menunjukkan kecenderungan menurun. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis apakah ukuran komite audit, keberagaman gender, keahlian, dan independensi komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas komite audit sebagai mekanisme tata kelola dalam menekan praktik penghindaran pajak.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Agency Theory

*Agency Theory* atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik saham (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) dalam sebuah perusahaan (Ziliwu *et al.*, 2021). Perusahaan memberikan kewenangan yang luas kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai struktur dan kebijakan internal sehingga manajemen memiliki akses ke informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan para pemegang saham (Hartinah, 2024). Dalam mengelola internal perusahaan, manajer cenderung memilih strategi perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajak agar laba bersih menjadi lebih tinggi atau yang biasa disebut *tax avoidance*. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan ekspektasi pemegang saham. Namun, pendekatan tersebut seringkali tidak sepenuhnya mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, karena praktik *tax avoidance* dapat merusak citra perusahaan, yang pada akhirnya justru merugikan pemilik perusahaan sendiri (Setyawan, 2021).

### Stakeholder Theory

*Stakeholder theory* menjelaskan bahwa perusahaan bertanggungjawab tidak hanya kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada semua individu atau pihak lain yang berkepentingan dengan kegiatan perusahaan. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, serta masyarakat luas (Aganthasyah, 2025). Kebijakan perpajakan perusahaan berdampak langsung pada kepentingan *stakeholder*, khususnya pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang salah satu tujuannya digunakan untuk mendanai pembangunan dan layanan sosial. Oleh karena itu, adanya praktik *Tax avoidance* dapat merugikan kepentingan *stakeholder* (Ernawati & Suryarini, 2024). Komite audit berperan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif sehingga kebijakan perpajakan perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan *stakeholder* (Qawqzeh & Al Zobi, 2025).

## **Teori Feminisme**

Teori feminisme menjelaskan bahwa perempuan memiliki status yang setara dengan laki-laki. Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan gender dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan. Keterlibatan perempuan berperan dalam efektivitas proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan (Sulistyawati *et al.*, 2024). Komite audit bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan dan kebijakan yang diterapkan perusahaan. Banyaknya anggota perempuan dalam komite audit dapat memengaruhi efektivitas pengawasan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan di bidang perpajakan (Sulistyawati *et al.*, 2024). Hal tersebut dilandasi oleh karakteristik anggota perempuan yang berhati-hati dan menghindari risiko yang dapat merugikan perusahaan ketika mengambil suatu keputusan (Dang & Nguyen, 2022).

## **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* merupakan usaha perusahaan dalam mengecilkan beban pajak mereka dengan memanfaatkan celah atau fleksibilitas dalam regulasi perpajakan (Qawqzeh & Al Zobi, 2025). Praktik ini dilakukan melalui strategi perencanaan pajak yang masih berada dalam batas legal sehingga perusahaan tidak dikenai sanksi atau konsekuensi hukum. Dalam konteks tata kelola, *tax avoidance* sering kali dianggap sebagai keputusan manajerial yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak demi meningkatkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan. Praktik *tax avoidance* tidak secara langsung melanggar peraturan perpajakan, tetapi sering melibatkan pengaturan laporan keuangan agar kewajiban pajak menjadi lebih rendah. Jika dilakukan secara agresif, praktik ini dapat berdampak pada penurunan reputasi yang dimiliki oleh perusahaan karena dianggap bertentangan dengan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan.

## **Komite Audit**

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dalam melakukan pengawasan internal perusahaan. Berdasarkan Peraturan No. 55/POJK. 04/2015 dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembentukan dan panduan kerja komite audit, komite audit mesti terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, dengan ketua komite audit dijabat oleh anggota independen dari dewan komisaris (Purnomo & Eriandani, 2022). Dang & Nguyen (2022) menyatakan bahwa kinerja komite audit ditentukan oleh berbagai karakteristik dari komite itu sendiri, antara lain seperti keberadaan anggota yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi, persentase anggota independen, keberagaman gender, dan ukuran komite audit.

## **Ukuran Komite Audit**

Ukuran komite audit mengacu pada banyaknya anggota yang ada dalam susunan komite audit di sebuah perusahaan (Lestari, 2018). Semakin banyak jumlah anggota, semakin besar pula kapasitas komite dalam melakukan tugas pengawasan, karena setiap anggota dapat saling melengkapi dalam hal pengalaman, perspektif, maupun kompetensi teknis. Pembagian tugas dalam komite audit akan lebih proporsional jika terdapat banyak anggota dalam komite tersebut. Dengan begitu, proses penelaahan laporan keuangan dan

pengawasan sistem pengendalian internal dapat dilakukan secara lebih efektif (Abdeljawad *et al.*, 2023).

### **Keberagaman Gender Komite Audit**

Keberagaman gender (*gender diversity*) menggambarkan proporsi keterlibatan anggota perempuan menjalankan fungsi pengawasan komite audit. Dalam komite audit, kehadiran perempuan memberikan perspektif yang berbeda dari anggota laki-laki. Mereka memiliki tingkat toleransi yang lebih rendah terhadap perilaku oportunistik yang dilakukan manajemen, termasuk praktik *tax avoidance* (Qawqzeh & Al Zobi, 2025).

### **Keahlian Komite Audit**

Keahlian anggota komite audit berkaitan dengan pengetahuan mendalam dalam akuntansi dan keuangan, yang diperoleh baik dari pengalaman kerja maupun pendidikan resmi (Fitriyanto, 2021). Sesuai dengan Peraturan No. 55/POJK. 04/2015 dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembentukan serta panduan kerja komite audit, diatur bahwa sangat penting untuk memiliki minimal satu anggota yang menguasai bidang akuntansi dan keuangan. Keahlian ini berperan penting bagi kemampuan komite audit dalam memahami laporan keuangan serta menilai kesesuaian kebijakan manajemen dengan standar yang berlaku (Purnomo & Eriandani, 2022).

### **Independensi Komite Audit**

Independensi komite audit menunjukkan sejauh mana anggota mampu menjalankan tugas pengawasan tanpa tekanan atau pengaruh dari manajemen maupun kepentingan pribadi lainnya. Komite audit yang independen tidak memiliki hubungan finansial, pekerjaan, atau keterikatan lain yang dapat mengganggu objektivitas, sehingga setiap penilaian terhadap laporan keuangan, kebijakan internal, dan keputusan manajemen dapat dilakukan secara objektif dan tanpa bias (Qawqzeh & Al Zobi, 2025).

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji secara empiris pengaruh karakteristik komite audit independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian memanfaatkan data berbentuk angka yang dianalisis dengan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2023). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang dipublikasikan melalui BEI dan situs resmi perusahaan selama periode 2021–2024. Penggunaan data sekunder dinilai relevan karena informasi tersebut telah dipublikasikan secara resmi, bersifat objektif, dan dapat digunakan untuk menilai kondisi tata kelola perusahaan serta perilaku perpajakan perusahaan secara terukur.

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2024, dengan jumlah populasi sebanyak 65 perusahaan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar unit analisis yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian

(Sugiyono, 2023). Kriteria tersebut meliputi perusahaan pertambangan yang terdaftar secara konsisten selama periode penelitian, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, tidak mengalami suspensi, tidak mengalami kerugian pada tahun pengamatan, menerbitkan laporan tahunan, dan menyediakan data yang lengkap terkait seluruh variabel penelitian. Berdasarkan proses seleksi tersebut, tahap awal menghasilkan 30 perusahaan atau 120 observasi, kemudian setelah dilakukan eliminasi berdasarkan kelengkapan dan kelayakan data, jumlah sampel akhir yang digunakan dalam analisis adalah 63 observasi. Pada tahap hasil penelitian, observasi tersebut berasal dari 20 perusahaan yang memenuhi kriteria akhir penelitian.

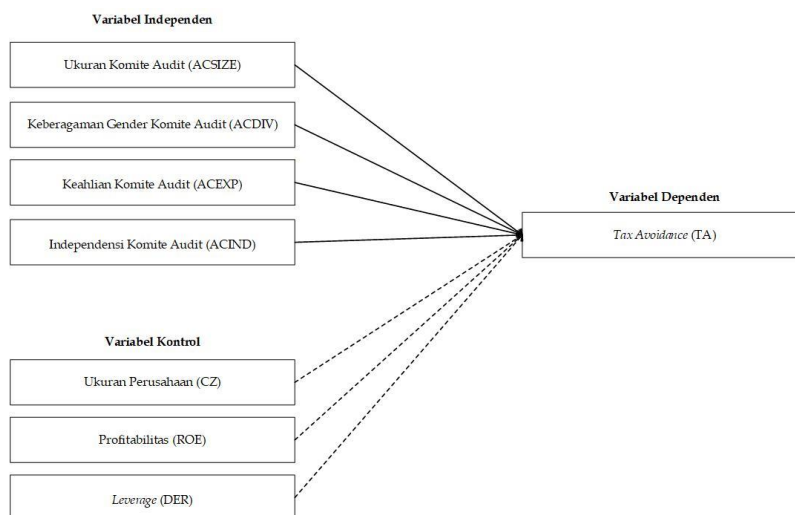
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Pengukuran ETR digunakan karena mampu mencerminkan beban pajak efektif perusahaan, semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, pemilihan pengukuran ETR dalam penelitian ini dikarenakan ETR merupakan rasio kuantitatif yang jelas dan terukur dihitung dengan membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak, sehingga memudahkan analisis statistik dan perbandingan antar perusahaan. Variabel independen yang diuji meliputi ukuran komite audit, keberagaman gender komite audit, keahlian komite audit, dan independensi komite audit. Ukuran komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit. Keberagaman gender diukur dari proporsi perempuan dalam komite audit. Keahlian komite audit diukur dari proporsi anggota yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Independensi komite audit diukur dari proporsi anggota komite audit yang independen. Selain itu, penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total aset, profitabilitas menggunakan *Return on Equity (ROE)*, dan leverage menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Penggunaan variabel kontrol dimaksudkan agar pengaruh variabel utama terhadap *tax avoidance* dapat diestimasi secara lebih akurat (Rahmawati *et al.*, 2021; Andriani *et al.*, 2022; Endrayanto *et al.*, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, karena data penelitian menggabungkan dimensi time series dan cross section. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data dianalisis melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian, serta analisis korelasi Pearson untuk melihat hubungan linear antarvariabel. Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui uji Chow, uji Lagrange Multiplier (LM), dan uji Hausman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*. Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas 0,00 sehingga Fixed Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model, uji LM menghasilkan nilai probabilitas 0,0003 sehingga Random Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model; dan uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,4760, yang menunjukkan bahwa Random Effect Model lebih tepat digunakan dibandingkan Fixed Effect Model.

Penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan uji White, dan uji autokorelasi menggunakan uji

Wooldridge. Pada tahap pengujian hipotesis, penelitian menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan kerangka konseptual yang digambarkan, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- $H_1$  : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- $H_2$  : Keragaman gender komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- $H_3$  : Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- $H_4$  : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Analisis Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 yang menyajikan masing-masing informasi untuk seluruh variabel dalam penelitian.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
acsize	63	3.095238	.5597893	2	6
acdiv	63	.221746	.283751	0	1
acexp	63	.7209524	.2344156	.25	1
acind	63	.9880952	.0555575	.67	1
cz	63	28.0946	2.124161	19.64	31.45
der	63	.8342857	1.02247	.04	5.16
roe	63	.1876539	.1324196	.0261915	.5838473
etr	63	.1907937	.1449839	.01	.87

Sumber: Output Stata 17, diolah penulis 2026

Berdasarkan tabel 1, variabel independen pertama yaitu ukuran komite audit (ACSIZE) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan maksimum 6,00 dengan nilai rata-rata 3,0952 serta standar deviasi 0,55979. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel memiliki sekitar tiga anggota komite audit dengan tingkat variasi data yang relatif rendah. Selanjutnya, variabel keberagaman gender komite audit (ACDIV) memiliki nilai minimum 0,00 dan maksimum 1,00 dengan rata-rata 0,2217 serta standar deviasi 0,28375.

Variabel keahlian komite audit (ACEXP) memiliki nilai minimum sebesar 0,25 dan maksimum 1,00 dengan rata-rata 0,7210 serta standar deviasi 0,23442. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki tingkat keahlian komite audit yang cukup tinggi. Sementara itu, variabel independensi komite audit (ACIND) menunjukkan nilai minimum 0,67 dan maksimum 1,00 dengan rata-rata 0,9881 serta standar deviasi 0,05556.

Pada variabel kontrol, ukuran perusahaan (CZ) memiliki nilai minimum sebesar 17,31 dan maksimum 31,45 dengan rata-rata 27,2238 serta standar deviasi 3,21393. Variabel profitabilitas (ROE) memiliki nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,80 dengan rata-rata 0,1232 serta standar deviasi 0,11497. Sementara itu, variabel leverage (DER) memiliki nilai minimum 0,04 dan maksimum 5,16 dengan rata-rata 0,8260 serta standar deviasi 1,02350.

Variabel dependen *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum 0,87 dengan rata-rata 0,1908 serta standar deviasi 0,14487. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel memiliki tingkat ETR sebesar 19,08%. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata mengindikasikan bahwa variasi ETR antar perusahaan relatif tidak terlalu tinggi.

### Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Metode ini tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat, sehingga tidak membedakan variabel dependen dan independen (Ghozali, 2021). Hasil analisis korelasi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Analisis Korelasi

	etr	acsize	acdiv	acexp	acind	cz	der
etr	1.0000						
acsize	0.0448 0.7276	1.0000					
acdiv	-0.0603 0.6388	-0.3372 0.0069	1.0000				
acexp	0.0802 0.5319	-0.4506 0.0002	0.0416 0.7461	1.0000			
acind	-0.0300 0.8152	-0.3571 0.0041	-0.2610 0.0388	0.0535 0.6770	1.0000		
cz	0.2250 0.0763	0.4253 0.0005	0.0046 0.9717	-0.5514 0.0000	-0.1466 0.2516	1.0000	
der	0.5685 0.0000	-0.1450 0.2568	-0.0505 0.6943	0.4262 0.0005	0.0309 0.8099	-0.0382 0.7662	1.0000
roe	-0.0536 0.6763	-0.1464 0.2522	0.1912 0.1334	0.0640 0.6181	-0.0175 0.8917	0.0975 0.4470	0.1501 0.2403
roe							1.0000

Sumber: Output Stata 17, diolah penulis 2026

Berdasarkan tabel 2, Variabel ukuran komite audit memiliki korelasi positif sebesar 0,0448 dengan nilai signifikansi 0,7276, yang menunjukkan hubungan lemah dan tidak signifikan. Variabel keberagaman gender komite audit menunjukkan korelasi negatif sebesar -0,0603 dengan nilai signifikansi 0,6388, sehingga hubungannya juga lemah dan tidak signifikan. Selanjutnya, variabel keahlian komite audit memiliki korelasi positif sebesar 0,0802 dengan nilai signifikansi 0,5319, yang mengindikasikan hubungan lemah dan tidak signifikan. Variabel independensi komite audit menunjukkan korelasi negatif sebesar -0,0300

dengan nilai signifikansi 0,8152, sehingga hubungannya lemah dan tidak signifikan terhadap ETR.

Variabel kontrol menunjukkan hasil yang lebih bervariasi. Variabel ukuran perusahaan memiliki korelasi positif sebesar 0,2250 dengan nilai signifikansi 0,0763, yang menunjukkan hubungan lemah dan mendekati signifikan. Variabel *leverage* menunjukkan korelasi positif sebesar 0,5685 dengan nilai signifikansi 0,0000, sehingga dapat dikatakan memiliki hubungan yang cukup kuat dan signifikan terhadap ETR. Adapun variabel profitabilitas memiliki korelasi negatif sebesar -0,0536 dengan nilai signifikansi 0,6763, yang menunjukkan hubungan lemah dan tidak signifikan.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data sampel layak digunakan dalam uji regresi data panel. Syarat uji asumsi klasik terpenuhi jika residual data berdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi (Ghozali, 2021). Namun, dalam penelitian ini model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) yang diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS). Metode GLS telah memperhitungkan permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam proses estimasi, sehingga pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini difokuskan pada uji normalitas dan uji multikolinearitas (Sugiyono, 2023).

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Data residual yang normal membuat hasil pengujian statistik lebih valid dan tidak bias (Ghozali, 2021). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		63	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	0,11123767	
Most Extreme Differences	Absolute	0,093	
	Positive	0,093	
	Negative	-0,058	
Test Statistic		0,093	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.		0,185
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,175
		Upper Bound	0,195

Sumber: Output SPSS 27, diolah penulis 2026

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig.* yaitu 0,200 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal karena nilai signifikansi > 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menilai apakah antar variabel independen dalam model regresi terjadi hubungan korelasi yang tinggi. Model regresi yang baik seharusnya

memiliki variabel independen yang tidak saling berkorelasi secara kuat, karena korelasi tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien sehingga hasil regresi menjadi bias (Ghozali, 2021). Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
roe	2.16	0.462525
acdiv	2.03	0.491565
acexp_c	2.00	0.500351
acsize_c	1.91	0.524501
der	1.87	0.534034
cz_c	1.59	0.630885
acind_c	1.41	0.707520
Mean VIF	1.85	

Sumber: Output Stata 17, diolah penulis 2026

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen bebas dari multikolinearitas.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian (Sugiyono, 2023). Pengujian hipotesis dalam analisis regresi ada 3, yaitu Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

### Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen, ketika dipertimbangkan bersama (Ghozali, 2021). Hasil uji F dapat dilihat pada gambar 2.

Prob > chi2	=	0.0000
-------------	---	--------

Gambar 2. Hasil Uji F

Sumber: Output Stata 17, diolah penulis 2026

Berdasarkan gambar 2. diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat satu variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan.

### Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen ketika diuji secara terpisah. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil uji t

etr	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
acsiz	-.0085277	.0277794	-0.31	0.759	-.0629743	.0459189
acdiv	.0912514	.0653304	1.40	0.162	-.0367938	.2192965
acexp	.244855	.0953063	2.57	0.010	.0580582	.4316519
acind	.4506881	.2292	1.97	0.049	.0014644	.8999118
cz	.0313347	.0137879	2.27	0.023	.004311	.0583585
der	.0593688	.0171778	3.46	0.001	.0257011	.0930366
roe	-.2247611	.096182	-2.34	0.019	-.4132744	-.0362478
_cons	-1.295785	.5111284	-2.54	0.011	-2.297578	-.293992

Sumber: Output Stata 17, diolah penulis 2026

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa variabel ukuran komite audit (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,759 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran komite audit (X1) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y), sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel keberagaman gender (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,162 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman gender komite audit (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Oleh karena itu, hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan adanya pengaruh keberagaman gender komite audit terhadap *tax avoidance* juga ditolak.

Hasil pengujian terhadap variabel keahlian komite audit (X3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,010 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0.244. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa keahlian komite audit (X3) memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Y). Dengan demikian, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak.

Hasil pengujian terhadap variabel keahlian komite audit (X4) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0.450. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa independensi komite audit (X4) memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Y). Dengan demikian, hipotesis ketiga ( $H_4$ ) yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Hasil pengujian terhadap variabel kontrol, ukuran perusahaan (CZ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, variabel profitabilitas (ROE) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,019 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya profitabilitas (ROA) juga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel *leverage* (DER) memiliki nilai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk melihat sejauh mana model regresi mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Ghozali, 2021). Hasil pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada gambar 3.

**Overall = 0.2760**

Gambar 3. Hasil Koefisien Determinasi

Sumber: Output Stata 17, diolah penulis 2026

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R-Square* sebesar 0,2760 yang artinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 27,6%. Sisanya yaitu sebesar 72,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji-t), dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.759 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Komite audit berperan membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan menelaah laporan keuangan serta memastikan bahwa proses pelaporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran tersebut lebih berfokus pada peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan perusahaan, sehingga komite audit tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan perpajakan maupun mengambil keputusan terkait strategi penghematan pajak perusahaan (Hartinah, 2024; Cristan & Poniman, 2023).

Pelaksanaan fungsi komite audit juga dipengaruhi oleh dukungan dan koordinasi dari berbagai organ perusahaan yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Apabila kerja sama antar pihak dalam perusahaan tidak berjalan secara optimal, maka peran komite audit dalam menjaga kualitas laporan keuangan menjadi kurang maksimal (Fauzan & Arsanti, 2021). Selain itu, banyaknya jumlah anggota komite audit belum mampu meningkatkan efektivitas pengawasan jika tidak diimbangi dengan independensi dan keahlian yang memadai dari anggota komite audit (Hidayah & Puspita, 2024; Dewi et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan ukuran komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

### **Pengaruh Keberagaman Gender Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji-t), dapat disimpulkan bahwa keberagaman gender komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,162 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa keberagaman gender komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Keberagaman gender dalam komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perbedaan gender dalam keanggotaan komite audit tidak selalu mempengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan. Anggota komite audit umumnya dipilih berdasarkan profesionalitas dan kompetensi yang dimiliki, bukan berdasarkan gender, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan (Hajawiyah et al., 2025).

Kondisi ini juga dapat disebabkan oleh masih rendahnya proporsi perempuan dalam komite audit pada perusahaan pertambangan di Indonesia, sehingga keberadaan anggota perempuan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan terkait perpajakan (Aganthasyah, 2025).

### **Pengaruh Keahlian Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji-t), dapat disimpulkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,010 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,24.

Dengan demikian, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* diterima.

Keahlian di bidang akuntansi dan keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif (Ziliwu et al., 2021). Hal ini dikarenakan anggota komite audit yang ahli lebih mampu menelaah laporan keuangan secara mendalam, sehingga mereka lebih mudah dalam mendeteksi celah yang dapat digunakan manajemen untuk melakukan penyimpangan, salah satunya praktik *tax avoidance* (Dang & Nguyen, 2022). Oleh karena itu, keahlian komite audit mampu membatasi ruang manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Temuan ini sejalan dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan adanya asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak terhadap perusahaan dibandingkan pemegang saham. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan posisi mereka pribadi dibandingkan kepentingan pemegang saham, salah satunya melalui tindakan *tax avoidance* (Aganthasyah, 2025). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat.

### **Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji-t), dapat disimpulkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,049 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,45. Dengan demikian, hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* diterima.

Anggota komite audit yang independen mampu bersikap objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan internal perusahaan (Qawqzeh & Al Zobi, 2025). Sikap objektif tersebut memungkinkan komite audit untuk menilai kebijakan dan laporan keuangan perusahaan secara lebih kritis sehingga berbagai perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dapat lebih mudah diidentifikasi, termasuk praktik *tax avoidance* yang berisiko bagi perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan posisi mereka pribadi daripada mengutamakan kepentingan pemegang saham (Aganthasyah, 2025). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara sehingga praktik *tax avoidance* yang berlebihan dapat merugikan kepentingan *stakeholder* (Ernawati & Suryarini, 2024).

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, ukuran komite audit dan keberagaman gender komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Sebaliknya, keahlian komite audit dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pengawasan komite audit lebih ditentukan oleh kapasitas profesional dan objektivitas anggotanya daripada aspek kuantitas semata.

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan efektivitas komite audit, terutama melalui penunjukan anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan serta mampu menjaga independensi dalam proses pengawasan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan maupun karakteristik perusahaan, serta memperluas objek dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif.

### Daftar Pustaka

- Abdeljawad, I., Al-Selkhi, J., & Abu-Ras, W. (2023). *Audit Committee and Tax Avoidance: an Empirical Study On Palestinian Corporations. Lecture Notes in Networks And Systems*, 621 LNNS, 265–275. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1\\_26](https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1_26)
- Aganthasyah, M. (2025). The Effectiveness of the Audit Committee in Reducing Tax Avoidance In Mining Companies In Indonesia with External Audit Quality As A Moderating Variable. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* (Vol. 8, Number 3).
- Andriani, S. D., Kusumastuti, R., & Hernando, R. (2022). Pengaruh Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Makanan Olahan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020). *Owner*, 7(1), 333–345. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1268>
- Badan Pusat Statistik. (2024, January 24). Realisasi Pendapatan Negara. Badan Pusat Statistik.
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya Praktik Good Corporate Governance Dalam Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/Jem.V17i3.6016>
- Cristan, Y., & Poniman, P. (2023). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1096–1112. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i2.1408>
- Daneshwara, R., & Riandoko, R. (2023). Determinants of Tax Morale: Empirical Study on Micro, Small and Medium Enterprises in Java. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.52869/St.V5i1.494>
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit Committee Characteristics and Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Economy. in *Cogent Economics and Finance* (Vol. 10, Number 1). *Cogent OA*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Dewi, S., Halim, J., Supriyanto, S., Karjantoro, H., & Hendi, H. (2025). The Impact of Audit Committee and audit Partner Tenure on Tax Avoidance in Banking. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 29(1), 2025. <https://doi.org/10.20885/Jaai.Vol29.I>
- Endrayanto, P. E., Millah Rahmawati, L., Arisudhana, A., & Kusuma, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 10. <https://doi.org/10.26486/Akun.V10i1.4419>
- Ernawati, I., & Suryarini, T. (2024). Pengaruh Pendidikan CEO, Kualitas Auditor Eksternal, dan CSR terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 16–27. <https://doi.org/10.21831/Nominal.V13i1.62105>

- Fauzan, P. M. D., & Arsanti, I. N. F. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance Institutional Ownership (Empirical Study of Manufacturing Companies in The Consumer Goods Industry Sector Listed on The Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2). [Www.Idx](http://www.idx.id).
- Fitriyanto, N. (2021). Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(1), 58-66. [Https://Jurnal.Unimus.Ac.Id/Index.Php/MAX](https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX)
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Witness. (2019). *Indonesia's Shifting Coal Money 3: Taxing Times For Adaro*.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., & Nilnamuna, A. Z. (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Gender Diversity Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Business And Entrepreneurship*, 13(1), 74-89.
- Hartinah, S. (2024). Determinants of Tax Avoidance In Indonesia. In *Jurnal Akuntansi Universitas Jember (Vol. 22, Number 2)*.
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 28-39. [Https://Doi.Org/10.2183/Nominal.V13il.63328](https://doi.org/10.2183/nominal.v13il.63328)
- Kompas. (2020, November 23). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. [Kompas.Com](http://kompas.com).
- Lestari, A. B. (2018). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Opini Audit Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)*.
- Nisasilmi Nasuha, F., Devanor, S., & Herdianti, S. (2024). Pengaruh Managerial Ability Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. [Https://Doi.Org/10.17509/Xxxx.Xxx](https://doi.org/10.17509/Xxxx.Xxx)
- Purnomo, H., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1743. [Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2022.V32.I07.P06](https://doi.org/10.24843/Eja.2022.V32.I07.P06)
- Purnomo, Z. H. S. (2024, April 18). *Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self Assessment Dalam Perpajakan Lebih Lanjut Di*. [Https://Pajak.Go.Id/Index.Php/Id/Artikel/Mengupas-Latar-Belakang-Penerapan-Sistem-Self-Assessment-Dalam-Perpajakan](https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan). Direktorat Jenderal Pajak.
- Qawqzeh, H. K., & Al Zobi, M. K. (2025). The Effect Of Female Percentage And Audit Committee Characteristics On Tax Avoidance: Audit Quality As A Moderating Variable. *Accounting Research Journal*. [Https://Doi.Org/10.1108/ARJ-11-2024-0367](https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2024-0367)
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(1), 158. [Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V5i1.206](https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206)
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152-161. [Https://Doi.Org/10.22219/Jaa.V4i2.17992](https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992)
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Sutopo, Ed.; 2nd Ed.)*. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Sulistiyawati, A., Intan, A., & Rahmawati, E. (2024). Determinant Of Tax Avoidance: Gender Diversity, Capital Intensity, Audit Committee, And Board Size (Vol. 16).
- Wildan, M. (2024, August 3). *Naikkan Penerimaan Pajak Di Negara Berkembang, IMF Susun Strategi*. [DDTC News](http://ddtcnews.com).

Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Eksternal Sebagai Variabel Moderasi. EQUITY, 24(1), 101-122. <https://doi.org/10.34209/Equ.V24i1.2258>